

KEBIJAKAN MONETER DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI LIMA NEGARA ASEAN

Lia Nazliana Nasution ^{1*}, Wahyu Indah Sari ², Andila Br. Lubis ³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl. Gatot Subroto Km. 4,5 Simpang Tj. Kec. Medan Sunggal, Kota Medan - Sumatera Utara - 20122

*Korespondensi Penulis: lianazliana@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract: *The purpose of this study is to find leading indicators of poverty rates based on monetary policy in the five ASEAN countries with the highest poverty rates in 2019. This study uses secondary data in the type of panel data, with time-series data starting from 2005 to 2019, and the object of the research country is Indonesia, Laos, PDR, Myanmar, Philippines, and Thailand. Using the ARDL Panel model, the estimation results found interest rates and exchange rates to affect the poverty rate in the long-term in five ASEAN countries, while the exchange rate and the money supply affect in the short term. The leading indicator of poverty levels in the five ASEAN countries from the money supply variable, because the results are significant in all observed countries except in Lao PDR and Indonesia.*

Keywords: ASEAN; Monetary Policy; Poverty level

PENDAHULUAN

Masalah besar yang dihadapi dan belum terselesaikan sampai saat ini oleh negara berkembang adalah kemiskinan. Kesulitan penanganan kemiskinan tersebut dilihat dari tingkat jumlah penduduk miskin atau luasnya suatu wilayah yang mengalami ketimpangan, sehingga semakin tinggi jumlah angka kemiskinan maka semakin tinggi juga angka kesulitan dalam mengatasinya. Kemiskinan sendiri merupakan faktor utama yang menghambat dalam proses pembangunan ekonomi. Pada hakikatnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Selain itu dengan pemerataan pembangunan dan memperluas lapangan pekerjaan juga dapat mengurangi angka kemiskinan.

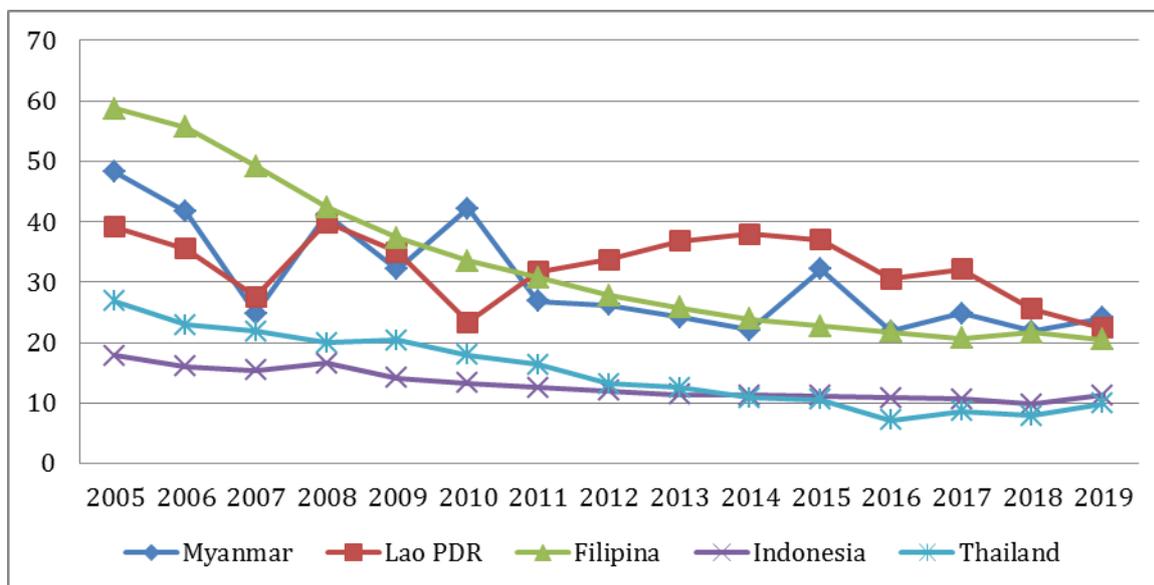
Pengalaman krisis tahun 1998 di Indonesia kemudian krisis keuangan tahun 2008 yang melanda berbagai negara di dunia termasuk Indonesia akibat kasus *subprime mortgage* di Amerika Serikat, memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian. Program pengentasan kemiskinan dan pembangunan menjadi terhambat. Hal ini tak terkecuali dirasakan juga oleh negara di ASEAN. Berikut daftar negara dengan tingkat kemiskinan terbesar di ASEAN pada tahun 2019:

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan ASEAN, Desember 2019 (%)

Negara ASEAN	Tingkat Kemiskinan
Myanmar	24.1
Lao PDR	22.4
Filipina	20.5
Indonesia	11.3
Thailand	9.9
Vietnam	8
Malaysia	3.8
Singapura	0.9
Kamboja	0.3
Brunei Darussalam	0.1

Sumber: (Indexmundi.com, 2020)

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dari sepuluh negara di ASEAN terdapat lima negara dengan angka kemiskinan tertinggi pada akhir tahun 2019 yaitu Myanmar, Lao PDR, Filipina, Indonesia, dan Thailand. Penyebab kemiskinan ini kurangnya koordinasi kebijakan dalam penanganan kemiskinan di setiap negara, selain itu juga dipicu dengan kenaikan harga beras dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Myanmar merupakan negara dengan angka kemiskinan tertinggi di ASEAN dengan persentase sebesar 24.1%, selanjutnya diikuti oleh Lao PDR sebesar 22.4%, Filipina sebesar 20.5%, Indonesia 11.3%, dan Thailand sebesar 9.9%.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan ASEAN Tahun 2005-2019

Sumber: (WorldBank)

Dari tahun 2005-2019 persentase tingkat kemiskinan di kelima negara ASEAN tersebut mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hanya pada negara Filipina dan Thailand yang mampu menekan tingkat kemiskinan cukup signifikan disetiap tahunnya dari 58.7% pada tahun 2005 menjadi 20.5% pada tahun 2019 di Filipina, dan dari 26.8% pada tahun 2005 menjadi 9.9% pada tahun 2019 di Thailand.

Pada tahun 2008 angka kemiskinan di Negara Lao PDR, Indonesia dan Myanmar mengalami peningkatan. Angka Kemiskinan negara Lao PDR sebesar 39.9% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Indonesia dengan angka kemiskinan sebesar 16.6% lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan Myanmar angka kemiskinan sangat melonjak tinggi sebesar 41.1%. Namun, Filipina dan Thailand mampu menekan angka kemiskinan pada saat itu. Peningkatan persentase ini merupakan dampak dari krisis ekonomi global. Pada tahun 2008 tersebut terjadinya *Global Financial Crisis* yaitu kolapsnya sistem keuangan yang berasal dari Amerika Serikat sehingga hal tersebut berimbas ke seluruh wilayah di Dunia.

Dengan demikian harus adanya kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan kemiskinan tersebut. Berbagai upaya dan kebijakan telah dan sedang dilakukan, tetapi kebijakan moneter merupakan instrumen modern yang diakui ampuh untuk mengelola perekonomian (Datumbanua, 2014). Menurut (Budiantoro & Saputra, <https://repository.theprakarsa.org/publications/663/policy-brief-05-rezim-suku-bunga-tinggi-dan-kebijakan-moneter-pro-kemiskinan>, 2013) bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi kemiskinan, dengan menjaga kebijakan moneter akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Akan tetapi dalam penelitian (Goshit PhD & Longduut, 2016) bahwa kebijakan moneter tidak efektif dan tidak memadai untuk mengurangi angka kemiskinan di negara Nigeria. Pada negara ini kebijakan moneter tidak mampu bergerak sendiri dalam mengatasi kemiskinan. Adanya gap penelitian tersebut, akhirnya penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap tingkat kemiskinan di lima negara ASEAN, yaitu Myanmar, Lao PDR, Filipina, Indonesia, dan Thailand.

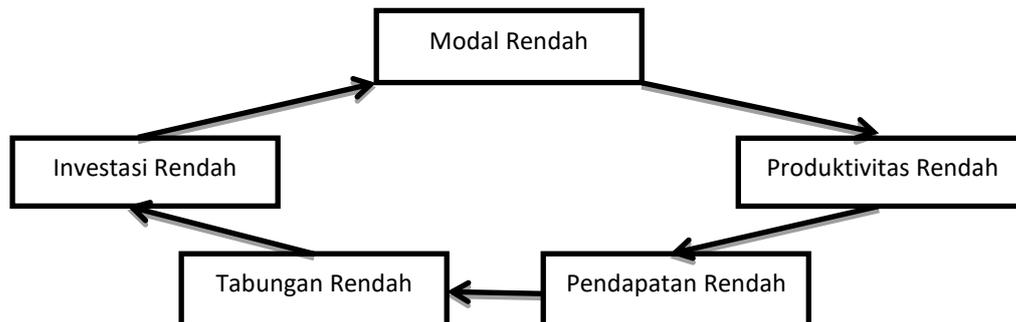
TINJAUAN PUSTAKA

Teori Lingkar Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)

Lingkaran setan kemiskinan merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi, sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana suatu negara khususnya negara berkembang mengalami banyak masalah untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Dalam teori ini mengatakan bahwa suatu negara miskin karena negara itu pada dasarnya memang miskin. Teori ini merupakan konsep yang mengendalikan suatu hubungan melingkar dari sumber-sumber daya yang cenderung saling berpengaruh satu sama lain sehingga menempatkan suatu negara miskin terus-menerus dalam suasana kemiskinan. Dengan kata lain lingkaran setan ini merupakan ibarat sebuah lingkaran yang tidak memiliki pangkal ujung, sehingga akan terus berputar pada lingkaran yang sama. Teori ini mencoba menjelaskan penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu :

- a. Secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, di mana penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya yang rendah.
- b. Kemiskinan timbul karena terdapatnya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan produksinya rendah, yang pada akhirnya upah pun menjadi rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini diakibatkan karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena faktor keturunan.
- c. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses modal.

Ketiga penyebab kemiskinan tersebut berdasarkan teori Lingkar Setan Kemiskinan (*Vicious Circle Of Povety*) yang dikemukakan oleh (Nurkse, 1953). Berikut ini skema lingkaran setan kemiskinan dalam teori Nurkse:



Gambar 2. Lingkar Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan menurut Ragnar Nurkes adalah adanya keterbelakangan dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima juga rendah. Rendahnya pendapatan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan investasi ini menyebabkan keterbelakangan. Begitu seterusnya. Ragnar Nurkse dalam (Kuncoro, 2006) mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Kemiskinan dalam suatu negara tidak memiliki ujung pangkal artinya negara miskin itu karena tidak memiliki apa-apa dan dengan tidak memiliki apa-apa menyebabkan negara menderita kemiskinan.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah semua tindakan atau upaya bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter (Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, dan Nilai Tukar) untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan moneter adalah untuk membantu mencapai sasaran-sasaran makro ekonomi antara lain: pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan akhir kebijakan moneter (Natsir, 2011). Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk

pengendalian ekonomi moneter untuk mencapai perkembangan perekonomian yang diinginkan.

Litteboy dan Taylor (2006) dalam (Natsir M. , 2014) menyatakan bahwa kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan moneter seperti uang beredar, kredit, suku bunga dan nilai tukar, untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, penyediaan lapangan kerja (pengangguran), keseimbangan neraca pembayaran. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan. Sasaran utama dari kebijakan moneter yaitu hanya bisa dilihat pencapaiannya dalam perspektif jangka panjang, artinya bahwa segala sesuatunya dipersiapkan sekarang untuk mencapai sasaran utama di masa yang akan datang (Maski, 2007).

Kebijakan moneter mencerminkan hubungan antara harga pinjaman dan tingkat uang pasokan pada perekonomian dalam pengentasan kemiskinan (Sunday, 2016). Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansi atau kontraktif (Engler, 2011). Agen dari pembangunan ekonomi telah menggunakan kebijakan moneter untuk banyak tujuan utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan yang rendah (Choundhry, 2013). Adapun keterkaitan antara instrumen kebijakan dan sasaran utama melalui jalur-jalur transmisi dikenal dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter.

Hubungan Kebijakan Moneter dan Tingkat Kemiskinan

Berbagai literatur penelitian terdahulu sudah membahas tentang pengaruh kebijakan moneter dengan tingkat kemiskinan. (Hapsari, 2017) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia, hasilnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, hanya pengangguran yang berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Ningsih & Andini (2018). Namun, (Nasution, Nasution, & Faried Lubis, 2020) menemukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter efektif dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

(Yusuf, 2013) mengamati hubungan kebijakan moneter dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hasilnya bahwa kebijakan moneter (inflasi) dalam jangka panjang dan instabilitas makro berdampak lebih besar pada tingkat kemiskinan. (Goshit PhD & Longduut, 2016) mengamati Nigeria dengan hasil bahwa tingkat bunga, kredit, rasio likuiditas bank, dan tingkat inflasi tidak berdampak signifikan pada tingkat kemiskinan. Hanya uang beredar, PDB, pengangguran, dan neraca pembayaran yang berpengaruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berjenis data panel dengan runtun waktu mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2019, dan negara yang diamati adalah lima negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi tahun 2019 di ASEAN, yaitu Myanmar, Lao PDR, Filipina, Indonesia, dan Thailand. Data diambil dari situs World Bank Data. Adapun model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap tingkat kemiskinan di lima negara ASEAN yaitu Panel *Auto Regression Distributed Lag* (ARDL), dengan tujuan untuk menemukan variabel kebijakan moneter yang mampu menjadi *leading indicator* tingkat kemiskinan di lima negara ASEAN.

Persamaan Panel ARDL yang dibentuk sebagai berikut:

$$KMS_{it} = \alpha + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 JUB_{it} + \beta_4 SB_{it} + \beta_5 KRS_{it} + e_{it} \tag{1}$$

Keterangan:

- KMS = Tingkat Kemiskinan (%)
- PE = Pertumbuhan Ekonomi (%)
- INF = Inflasi IHK (%)
- JUB = Jumlah Uang Beredar (%)
- SB = Tingkat suku bunga riil (%)
- KRS = Nilai tukar terhadap USD
- α = Konstanta
- β = Koefisien

- e = Error term
- i = Jumlah observasi (Lima negara ASEAN)
- t = runtun waktu 15 tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Panel ARDL

Analisis Panel *Auto Regressive Distributin Lag* (ARDL) menguji data *pooled* yaitu gabungan data *cross section* (negara) dengan data *time series* (tahunan). Dimana hasil panel ARDL lebih baik dibandingkan dengan panel biasa dikarenakan panel ARDL mampu terkointegrasi jangka panjang dan memiliki distribusi *lag* yang paling sesuai dengan teori.

Sebelum melakukan uji Panel ARDL, maka dilakukan terlebih dahulu uji *unit root* dengan uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF) *Fisher Test* tiap variabel amatan dengan hasil:

Tabel 2. Output Uji *Unit Root*

Variabel	Nilai ADF	Prob.	Keterangan
KMS	-10.2453	0.0001	Stasioner pada 1 st Difference
PE	-10.982	0.0001	Stasioner pada 1 st Difference
INF	-4.2586	0.001	Stasioner pada Level
JUB	-5.9635	0.000	Stasioner pada Level
SB	-6.1791	0.000	Stasioner pada Level
KRS	-8.222	0.000	Stasioner pada 1 st Difference

Sumber: Output Eviews 10.0

Dari output uji *unit root* terlihat bahwa variabel inflasi, JUB, dan suku bunga stasioner pada level, sedangkan variabel kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar stasioner pada 1st difference. Oleh karena asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji Panel ARDL adalah data tiap variabel harus stasioner pada *level* atau *1st difference*, maka semua variabel tersebut diterima hasilnya dan dapat dilakukan uji selanjutnya.

Adapun output dari uji Panel ARDL adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Output Uji Panel ARDL

Variabel	Koefisien	Prob.
Long Run Equation		
PE	2.671628	0.7883
INF	0.231142	0.3495
JUB	-0.044798	0.4905
SB	0.120152	0.0506
LOGKRS	-3.843316	0.0270
Short Run Equation		
Cointeq01	-0.693069	0.0353
D(PE)	12.38384	0.4444
D(INF)	-0.631044	0.1220
D(JUB)	0.113385	0.0296
D(SB)	-0.360941	0.3046
D(LOGKRS)	-11.93071	0.0259
C	25.15747	0.0795

Sumber: Output Eviews 10.0

Pada persamaan jangka panjang, hasil menemukan hanya nilai tukar yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Myanmar, Lao PDR, Filipina, Indonesia, dan Thailand dengan nilai koefisien sebesar -3.843 dan prob 0.027 < 0.05. Artinya dalam jangka panjang semakin tinggi nilai tukar dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sedangkan pada persamaan jangka pendek jumlah uang beredar dan nilai tukar yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan koefisien masing-masing

0.113 dan -11.93. Artinya semakin tinggi jumlah uang beredar akan semakin meningkatkan kemiskinan di Myanmar, Lao PDR, Filipina, Indonesia, dan Thailand. Nilai Cointeq01 sudah menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan dengan nilai $0.0353 < 0,05$. Ini memberi arti model Panel ARDL diterima, dan dapat dilakukan uji panel per negara.

2. Hasil Uji Panel ARDL per Negara

Adapun output uji Panel ARDL per negara sebagai berikut :

Tabel 4. Output Panel ARDL Negara Myanmar

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
COINTEQ01	-1.378630	-17.78997	0.0004
D(PE)	-2.160544	-0.004822	0.9965
D(INF)	-1.107354	-0.173836	0.8731
D(JUB)	0.234123	5.837932	0.0100
D(SB)	-1.211745	-0.187037	0.8636
D(LOGKRS)	-0.980247	-0.051728	0.9620
C	46.44140	0.114362	0.9162

Sumber: Output Eviews 10.0

Hasil Panel ARDL untuk negara Myanmar menunjukkan hanya variabel jumlah uang beredar yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai prob lebih kecil dari 0.05

Tabel 5. Output Panel ARDL Negara Laos PDR

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
COINTEQ01	-1.550141	-11.17618	0.0015
D(PE)	75.83031	0.035541	0.9739
D(INF)	-1.012071	-13.01552	0.0010
D(JUB)	0.004755	1.810125	0.1680
D(SB)	-0.024014	-3.881448	0.0303
D(LOGKRS)	-18.80400	-0.000447	0.9997
C	69.63125	0.111533	0.9182

Sumber: Output Eviews 10.0

Hasil Panel ARDL untuk negara Lao PDR menunjukkan hanya variabel inflasi dan suku bunga yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai prob lebih kecil dari 0.05

Tabel 6. Output Panel ARDL Negara Filipina

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
COINTEQ01	-0.126849	-69.71105	0.0000
D(PE)	0.719933	0.253476	0.8163
D(INF)	0.537156	1.070387	0.3629
D(JUB)	0.008897	7.663548	0.0046
D(SB)	0.580757	1.164420	0.3284
D(LOGKRS)	1.001568	0.001867	0.9986
C	2.133750	0.467646	0.6719

Sumber: Output Eviews 10.0

Hasil Panel ARDL untuk negara Filipina menunjukkan hanya variabel jumlah uang beredar yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai prob lebih kecil dari 0.05

Tabel 7. Output Panel ARDL Negara Indonesia

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
COINTEQ01	-0.229812	-8.351336	0.0036
D(PE)	-11.65827	-0.113337	0.9169
D(INF)	0.045975	5.356280	0.0127
D(JUB)	0.094725	2.739224	0.0714
D(SB)	-0.034208	-7.018061	0.0059
D(LOGKRS)	-15.58519	-0.139710	0.8977
C	5.644249	0.302213	0.7822

Sumber: Output Eviews 10.0

Hasil Panel ARDL untuk negara Indonesia menunjukkan hanya variabel inflasi dan suku bunga yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai prob lebih kecil dari 0.05.

Tabel 8. Output Panel ARDL Negara Thailand

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
COINTEQ01	-0.179912	-93.16371	0.0000
D(PE)	-0.812227	-1.012902	0.3857
D(INF)	-1.618927	-5.536698	0.0116
D(JUB)	0.224426	9.134254	0.0028
D(SB)	-1.115494	-4.583525	0.0195
D(LOGKRS)	-25.28568	-0.068330	0.9498
C	1.936681	0.882469	0.4425

Sumber: Output Eviews 10.0

3. Pembahasan

Hasil penelitian ini menemukan untuk stabilitas jangka panjang, nilai tukar signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Myanmar, Lao PDR, Filipina, Indonesia, dan Thailand. Untuk stabilitas jangka pendek jumlah uang beredar dan nilai tukar yang signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Adapun hasil masing-masing negara menunjukkan bahwa kebijakan moneter melalui variabel jumlah uang beredar menjadi *leading indicator* tingkat kemiskinan dikarenakan signifikan di semua negara kecuali Lao PDR dan Indonesia. Ini artinya kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar menjadi fokus utama dalam penurunan tingkat kemiskinan di Myanmar, Filipina, dan Thailand.

Leading indicator tingkat kemiskinan di Negara Myanmar dan Filipina berasal dari variabel jumlah uang beredar. *Leading indicator* tingkat kemiskinan di Negara Lao PDR berasal dari variabel inflasi dan suku bunga. *Leading indicator* tingkat kemiskinan di negara Indonesia berasal dari variabel inflasi dan suku bunga. Sedangkan di Thailand, ditemukan variabel inflasi, jumlah uang beredar dan suku bunga menjadi *leading indicator* tingkat kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budiantoro & Saputra, 2013) (Yusuf, 2013) bahwa kebijakan moneter ekspansif dengan meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat dapat membuat perekonomian tumbuh dan berkembang yang memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan bahwa inflasi dan suku bunga menjadi variabel yang perlu dikendalikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Lao PDR dan juga Indonesia. Di Filipina dan Myanmar, hanya variabel jumlah uang beredar yang perlu dikendalikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Berbeda dengan Thailand, terdapat tiga variabel yang menjadi fokus pengendalian kebijakan moneter dalam menurunkan tingkat kemiskinan, yaitu inflasi, jumlah uang beredar, dan suku bunga.

Implikasi kebijakan bagi bank sentral di masing-masing negara amatan agar memberi perhatian untuk lebih meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, tidak hanya kepada stabilitas

makroekonomi, karena melalui kebijakan moneter yang tepat dan efektif akan mampu menurunkan kemiskinan di Myanmar, Lao PDR, Filipina, Indonesia, dan Thailand.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiantoro, S., & Saputra, W. (2013, June). Retrieved 2021, from <https://repository.theprakarsa.org/publications/663/policy-brief-05-rezim-suku-bunga-tinggi-dan-kebijakan-moneter-pro-kemiskinan>:
<https://repository.theprakarsa.org/media/663-rezim-suku-bunga-tinggi-dan-kebijakan-mo-a632a683.pdf>
- Choundhry, M. (2013). <https://www.cnn.com>. Retrieved 2021
- Datumbanua, I. A. (2014). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Universitas Sebelas Maret.
- Engler, P. (2011). Kebijakan Moneter dan Pengangguran di Ekonomi Terbuka. *NCER Seri Kertas Kerja No. 77*.
- Goshit PhD, G. G., & Longduut, T. D. (2016, April). Indirect Monetary Policy Instruments and Poverty Reduction in Nigeria: An Empirical Evidence form Time Series Data. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 6(4), 86-101.
- Hapsari, R. (2017). Inflasi (Perubahan Harga). Jakarta: Universitas Gunadharma.
- Indexmundi.com. (2020). <https://www.indexmundi.com/>. Retrieved 2021, from <https://www.indexmundi.com/>.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maski, G. (2007). *Transmisi Kebijakan Moneter: Kajian Teoritis dan Empiris*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Nasution, L. N., Nasution, D. P., & Faried Lubis, A. I. (2020). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 73-77.
- Natsir. (2011). Analisis Empiris Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia melalui Jalur Suku Bunga (Interest Rate Channel) Periode 1990:2-2007:1. *Majalah Ekonomi*, 110-123.
- Natsir, M. (2014). *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford : Oxford University Press.
- WorldBank. (n.d.). <https://data.worldbank.org/>. Retrieved 2021, from <https://data.worldbank.org/>.
- Yusuf, M. (2013). Mencari Hubungan Antara Kebijakan Moneter dan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan. *Jurnal Analytica Islamica*, 157-176.